

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMELIHARAAN  
PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

***THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND BALANCED FUNDS  
ON MAINTENANCE EXPENDITURE  
ON THE LOCAL GOVERNMENT BUDGET***

**Aulia Fikki**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Aceh Besar  
[akuntan2007@gmail.com](mailto:akuntan2007@gmail.com)

**Abstract**

*This research is aimed to provide empirical evidence of the influence of real regional income (PAD) and proportion funding toward expense of maintenance through capital expenditure in Aceh government regency/ city and town from 2015 to 2017. Populations used in this research are 18 regencies, and 5 city and town in Aceh government. Due to the consideration of the data availability, therefore the main targets of this study are 13 regencies and 5 cities and town. The data analysis method used in this research is path analysis method. Result of the research shows that simultaneously the allocation of real regional income (PAD) and proportion funding are influential to capital expenditure and expense of maintenance. But, partially, real regional income (PAD) has a negative influence to the expense of maintenance, whereas proportion funding and capital expenditure partially influential toward expense of maintenance.*

*Keywords: Real Regional Income (PAD), Proportion Funding, Capital Expenditure, Expenditure of Maintenance*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan proporsi pendanaan terhadap biaya pemeliharaan melalui belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota Aceh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 kabupaten, dan 5 kota dan kota di pemerintahan Aceh. Karena pertimbangan ketersediaan data, maka sasaran utama penelitian ini adalah 13 kabupaten dan 5 kota besar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan alokasi pendapatan asli daerah (PAD) dan proporsi pendanaan berpengaruh terhadap belanja modal dan biaya pemeliharaan. Namun secara parsial pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap biaya pemeliharaan, sedangkan proporsi dana dan belanja modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap biaya pemeliharaan.*

*Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Pemeliharaan*

### **A. Pendahuluan**

Proses penyusunan anggaran di Indonesia telah memasuki era baru seiring dengan berjalannya reformasi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dituntut bersikap transparan, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerahnya, karena setiap uang yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini berbeda pada masa sebelumnya dimana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi yakni Pemerintah Pusat, sehingga tanggung jawab Pemerintah Daerah tidak terlalu besar. Namun, setelah reformasi pengelolaan keuangan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya lebih besar dan campur tangan Pemerintah Pusat menjadi semakin kecil. Dengan adanya perubahan tersebut yang merupakan wujud dari pemberian otonomi daerah, maka diperlukannya suatu sistem perundang-undangan tentang perencanaan anggaran belanja daerah. Dimana sistem perundangan-undangan tersebut harus dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka menciptakan transparansi publik.

Sejak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Aceh mendapat posisi istimewa daripada provinsi lain di Indonesia. Aceh mempunyai wewenang yang lebih dalam mengurus daerahnya. Pelaksanaan otonomi khusus ini mengakibatkan perubahan dalam pembuatan keputusan mengenai pengalokasian sumber daya dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Keadaan ini didukung dengan disahkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta revisinya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Format Anggaran Pemerintah Daerah. Format yang baru ini di bagi menjadi dua kategori besar yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 memperkenalkan standar anggaran baru yang berbasis kinerja yang menggantikan format belanja aparatur pemerintah dan belanja publik sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 (World bank, 2008).

Format pembelanjaan tersebut meningkatkan perhatian pada penerima manfaat dan bukan program atau proyek. Hal ini berdampak kepada publik karena pembelanjaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melakukan pelayanan kepada publik. Namun fakta yang terjadi selama ini di lapangan adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk aparatur lebih besar daripada belanja untuk kepentingan publik. Sebagaimana yang dilaporkan oleh World Bank (2006), belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aparatur terus meningkat dari 12,4% pada tahun 1999 sampai ke posisi hampir 40% pada tahun 2005, sedangkan pengeluaran untuk kepentingan publik yaitu prasarana terus menurun dari 50% tahun 1999 ke posisi 28% pada tahun 2005.

Selain itu, selama ini Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan belanja pemeliharaan berdasarkan aset tetap yang dimiliki atas belanja modal yang digunakan. Misalnya ketika proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD, mereka tidak melihat besaran nilai aset tetap sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan. Hal ini dikarenakan masih ada Pemerintah Daerah yang belum memiliki neraca awal (Abdullah, 2006).

Aceh merupakan salah satu daerah yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah. Rendahnya kapasitas ini mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah yang rendah sehingga daerah masih sangat tergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran ini ditujukan untuk meningkatkan investasi modal yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Selain itu, peningkatan investasi ini dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal sebagai variabel intervening pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
6. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
7. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.

## **B. Kerangka Teori**

### **Pengertian Anggaran Daerah**

*Governmental Accounting Standards Board (GASB)* mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164). Sedangkan anggaran daerah merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, serta penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002:61).

Dalam PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah juga dijelaskan anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang

diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi devisa atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Menurut Mardiasmo (2002:63), pentingnya anggaran karena beberapa alasan yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade off*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

### **Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan merupakan salah satu bagian dari belanja daerah yang bersifat rutin serta belanja pemeliharaan ini akan tetap ada selama aktiva tetap masih ada. Dengan demikian, belanja pemeliharaan dapat didefinisikan sebagai belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya (Abdullah 2006).

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya periode pemakaian aktiva tetap, sama seperti dalam perhitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, begitu juga jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun.

Belanja pemeliharaan berbeda dengan biaya depresiasi. Belanja pemeliharaan merupakan belanja yang dikeluarkan untuk menjaga aset tetap siap untuk digunakan. Sedangkan biaya depresiasi menurut PP No. 24 tahun 2005, Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jadi biaya depresiasi merupakan penurunan nilai dari suatu aset. Selain itu biaya depresiasi adalah pengalokasian *costs* yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk memperoleh aset tetap kedalam periode-periode penggunaan aset tetap setelah sebelumnya dikurangi nilai residu.

Jadi, biaya penyusutan dihitung secara periodik karena aset tetap dianggap “masih dimiliki” dan “dipakai”. Sementara biaya pemeliharaan dialokasikan untuk menjamin bahwa aset tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, *costs* tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan, tetapi justru tergantung pada kondisi harga berlaku (misalnya biaya servis, dan lain sebagainya). Artinya, prosedur pembuatan keputusan dan pelaporan diantara kedua biaya ini berbeda (Abdullah,2006).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soekarwo (2003), pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD adalah dengan melakukan tiga cara, yaitu:

1. Intensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada. Dapat dilakukan dengan operasional pemungutannya, misalnya pengawasan untuk melihat kebocoran, tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kenal pajak dapat dikenakan pajak.
2. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi. Dengan demikian perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pembiayaan pembangunan atas kemampuan sendiri merupakan salah satu tolak ukur bagi maju mundurnya penyelenggaraan ekonomi daerah. PAD merupakan salah satu bagian dari sumber pendatan daerah, yaitu segenap penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diakui pada saat di terima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum (PSAP No.24 Tahun 2005).

### **Dana Perimbangan**

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mendefinisikan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dimana mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana perimbangan diakui pada saat di terima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum (PSAP No. 24 Tahun 2005).

## **Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah (Halim, 2004:73). Pada konsep perusahaan Welsch, et.al (2000:343) menyatakan bahwa suatu pengeluaran atau pembiayaan modal adalah penggunaan dana (contoh kas) untuk penyediaan harta operasi yang akan menolong untuk memperoleh pendapatan di masa datang atau mengurangi biaya masa datang. Anggaran modal (*capital budget*) berupa anggaran untuk pembelian barang modal (aktiva tetap) untuk investasi. Aktiva tetap merupakan barang modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun, sehingga anggaran untuk pembelian aktiva tetap merupakan anggaran jangka panjang (Nafarin M, 2003:83).

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintahan Daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja. Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti pada bidang pendidikan berupa gedung, peralatan laboratorium, mobiler, bidang kesehatan berupa rumah sakit, mobil ambulance, sarana umum seperti jalan, jembatan. Sementara satuan lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi, pembuatan kartu identitas kependudukan, pengamanan, dan lain sebagainya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 merevisi struktur belanja daerah yang terdapat pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Pada pasal 24 Permendagri No. 13 Tahun 2006 merinci belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok belanja. Menurut pasal 39 PP No. 58 Tahun 2005, setiap jenis belanja yang dianggarkan memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian dan hasil tersebut.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



Dalam hal ini, belanja modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PSAP No. 24 Tahun 2005).

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak seluruh tambahan pendapatan tersebut dialokasikan dalam belanja. Secara empiris juga ditemukan *flypaper effect* dalam hubungan pendapatan dengan belanja (Moisio, 2002) yang menyatakan bahwa orang akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil dari *effort*-nya sendiri dibandingkan dengan pendapatan dari pihak lain (seperti *grants* atau *transfer*).

Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah & Asmara, 2006). Sementara dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pemeliharaan Melalui Belanja Modal**

Belanja modal berbeda dengan belanja operasional dan belanja pemeliharaan dalam hal keputusan. Anggaran operasional dan pemeliharaan melibatkan para eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, badan, bagian, dan kantor. Sedangkan belanja modal terutama yang berkaitan dengan infrastruktur sangat bergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan. Disisi lain pembiayaan untuk kedua anggaran tersebut juga berbeda. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*) sedangkan pendanaan untuk belanja operasional cenderung bersumber dari pendapatan, misalnya biaya pelayanan (*service charges*) dan pajak yang dibebankan kepada masyarakat (Abdullah, 2006). Perbedaan lain adalah anggaran

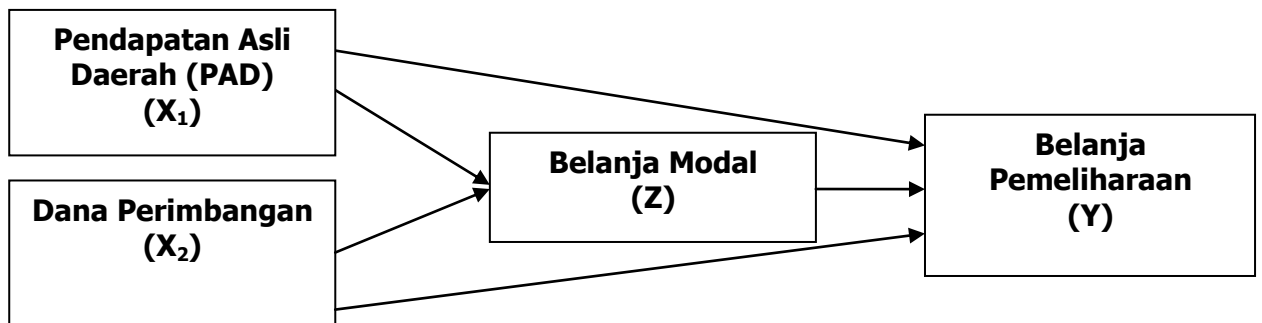
operasional dirancang untuk satu tahun anggaran sementara kebanyakan anggaran belanja modal untuk beberapa periode atau tahun anggaran (Bland dan Nunn,1992).

Menurut Bland dan Nunn (1992) dalam Abdullah (2006) proses penyusunan anggaran mencakup dua komponen belanja yang memiliki siklus berbeda, yaitu siklus anggaran operasional yang menghasilkan rencana keuangan bagi aktivitas pemerintahan yang berjalan terus menerus dan siklus anggaran belanja modal yang merupakan perencanaan untuk mendapatkan peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap penganggaran di pemerintahan daerah. Pengalokasian belanja modal tidak selalu terpisah pengalokasian belanja operasional (Abdullah, 2006). Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, serta diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja operasional, pemeliharaan dan belanja modal itu sendiri. Namun, tidak berarti belanja modal sebagai penyebab atau *predictor* bagi kenaikan belanja operasional (Abdullah, 2006).

Dengan demikian, apabila suatu organisasi melakukan suatu kebijakan untuk membelanjakan dana dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk belanja modal, maka akan menyebabkan munculnya anggaran operasional dan pemeliharaan atas organisasi tersebut. Dimana belanja operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil dan tidak menambah fungsi suatu aset (Nordiawan, 2006:50), serta belanja pemeliharaan muncul akibat konsekuensi dari adanya belanja modal (Halim, 2004:73).

Berdasarkan uraian di atas, skema pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1: Skema Paradigma Penelitian**

### **Hipotesis**

- H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara simultan
- H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal sebagai variabel intervening pada anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara simultan
- H<sub>3</sub>: Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
- H<sub>4</sub>: Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
- H<sub>5</sub>: Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
- H<sub>6</sub>: Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.
- H<sub>7</sub>: Apakah belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Aceh secara parsial.

## C. Metode Penelitian

### Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 23 kabupaten/kota dimana terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Namun karena ketidaktersediaan data, maka populasi penelitian ini menjadi 17 kabupaten/kota yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Pemilihan populasi dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu suatu metode pemilihan populasi yang digunakan untuk meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah atau sasaran penelitian (Sugiyono, 2005:77).

**Tabel 1**  
**Kabupaten/Kota yang Menjadi Populasi**

Nama Kabupaten/Kota
Kab. Aceh Barat
Kab. Aceh Besar
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh Singkil
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Timur
Kab. Aceh Utara
Kab. Bireuen
Kab. Aceh Pidie
Kota Banda Aceh
Kota Sabang
Kota Langsa
Kota Lhokseumawe
Kab. Nagan Raya
Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Simeulue
Kab. Bener Meriah

Sumber: BPK RI Pemerintah Aceh

### Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dari tahun 2006-2008. Data yang dibutuhkan adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan belanja pemeliharaan yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan arus kas. Data sekunder tersebut diperoleh dari perwakilan BPK-RI di Banda Aceh.

## **Definisi dan Operasional Variabel**

### **1. Variabel Terikat (*Dependent variable*)**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2005:33). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya (Abdullah, 2006). Belanja pemeliharaan diukur dengan jumlah anggaran belanja pemeliharaan yang tersaji di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan arus kas.

### **2. Variabel Bebas (*Independent variable*)**

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau yang menjadi sebab (Sugiyono, 2005:34). Pada penelitian ini variabel independennya adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ )**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Dana Perimbangan ( $X_2$ )**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **3. Variabel Antara (*Intervening variable*)**

Variabel antara adalah variabel yang mengemuka antara waktu variabel bebas mulai bekerja mempengaruhi variabel terikat, dan pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat (Sekaran, 2002:124). Variabel antara pada penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal adalah belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah (Halim, 2004:73).

### Metode Analisis Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode *Path Analysis*. Analisa ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel penyebab (variabel eksogen) terhadap variabel akibat (variabel endogen). Ada dua persamaan *Path Analysis* yang digunakan dalam penelitian ini. persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Z = P_{ZX1}X_1 + P_{ZX2}X_2 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX2}X_2 + P_{YZ1}Z_1 + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y = Belanja Pemeliharaan

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Perimbangan

Z = Belanja Modal

p = Koefisien *Path*

ε<sub>1</sub> = Variabel lainnya yang mempengaruhi Z

ε<sub>2</sub> = Variabel lainnya yang mempengaruhi Y

Pengujian pengaruh variabel bebas (PAD dan dana perimbangan) terhadap variabel terikat (belanja pemeliharaan) melalui variable antara (Belanja modal) dilakukan dengan dua cara yaitu, uji secara parsial dan uji secara simultan. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu disusun rancangan pengujian hipotesis.

## D. Hasil Penelitian Dan Diskusi

### Deskripsi dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari tahun 2015-2017. Data yang dibutuhkan adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan belanja pemeliharaan yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan arus kas. Data sekunder tersebut diperoleh dari perwakilan BPK-RI di Banda Aceh. Analisis data penelitian di uji dengan *Path Analysis*

yang kemudian diolah dengan menggunakan *software computer* melalui *Program Statistic Package for Sosial Science (SPSS)*

## **Pengujian Hipotesis**

### **1. Pengujian Secara Simultan**

- a. Pengaruh PAD ( $X_1$ ) dan dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap belanja modal ( $Z$ )

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal secara simultan diperoleh nilai 0,659. Oleh karena  $R^2 \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Artinya 65,9 % variasi variabel dependen yaitu belanja modal ditentukan secara bersama-sama oleh variabel independen, yaitu PAD dan dana perimbangan, sisanya sebesar 34,1 % dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini ( $\epsilon$ ).

- b. Pengaruh PAD ( $X_1$ ) dan dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap belanja pemeliharaan ( $Y$ ) melalui belanja modal ( $Z$ )

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal secara simultan diperoleh nilai 0,450. Oleh karena  $R^2 \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal secara simultan. Artinya 45 % variasi variabel dependen yaitu belanja pemeliharaan ditentukan secara bersama-sama oleh variabel independen melalui variable intervening juga, yaitu PAD, dana perimbangan dan belanja modal, sisanya sebesar 55 % dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini ( $\epsilon$ ).

### **2. Pengujian Secara Parsial**

- a. Pengaruh PAD ( $X_1$ ) terhadap belanja modal ( $Z$ )

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien *Path* pengaruh PAD terhadap belanja modal secara parsial diperoleh nilai 0,166. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap

nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai koefisien yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena  $P_{ZX1} \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap belanja modal secara parsial. Untuk mengetahui kuat-lemahnya pengaruh PAD terhadap belanja modal ditunjukkan oleh koefisien determinasi  $(P_{ZX1})^2$  Sebesar  $(0,116)^2 \times 100\% = 2,76\%$ . Ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh sangat lemah terhadap belanja modal yakni sebesar 2,76%.

b. Pengaruh dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap belanja modal ( $Z$ )

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien *Path* pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal secara parsial diperoleh nilai 0,797. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai koefisien yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena  $P_{ZX2} \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap belanja modal secara parsial. Untuk mengetahui kuat-lemahnya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal ditunjukkan oleh koefisien determinasi  $(P_{ZX2})^2$  Sebesar  $(0,797)^2 \times 100\% = 63,52\%$ . Ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh cukup (sedang) terhadap belanja modal yakni sebesar 63,52%.

c. Pengaruh PAD ( $X_1$ ) terhadap belanja pemeliharaan ( $Y$ )

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien *Path* pengaruh PAD terhadap belanja p secara parsial diperoleh nilai -0,03. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai koefisien yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena  $P_{ZX1} \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan secara parsial.



d. Pengaruh dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap belanja pemeliharaan (Y)

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien *Path* pengaruh dana perimbangan terhadap belanja pemeliharaan secara parsial diperoleh nilai 0,593. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai koefisien yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena  $P_{ZX_2} \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan secara parsial. Untuk mengetahui kuat-lemahnya pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja pemeliharaan ditunjukkan oleh koefisien determinasi  $(P_{YX_2})^2$  Sebesar  $(0,593)^2 \times 100\% = 35,16\%$ . Ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh lemah terhadap belanja pemeliharaan yakni sebesar 35,16 %.

e. Pengaruh belanja modal (Z) terhadap belanja pemeliharaan (Y)

Berdasarkan perhitungan *Path Analysis*, nilai koefisien *Path* pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan secara parsial diperoleh nilai 0,288. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai koefisien yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena  $P_{YZ} \neq 0$ , maka penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belanja modal (Z) berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan secara parsial. Untuk mengetahui kuat-lemahnya pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan ditunjukkan oleh koefisien determinasi  $(P_{YZ})^2$  Sebesar  $(0,288)^2 \times 100\% = 8,29\%$ . Ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh sangat lemah terhadap belanja pemeliharaan yakni sebesar 8,29 %.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Path**

Variabel Endogen	Variabel Eksogen	Koefisien Path atau R <sup>2</sup>	Keputusan menerima H <sub>0</sub> atau menerima H <sub>a</sub>	Besarnya pengaruh P <sub>YXi</sub> <sup>2</sup> atau R <sup>2</sup>	Besarnya pengaruh
Belanja Modal (Z)	X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub>	0,659	R <sup>2</sup> ≠ 0, maka Menerima H <sub>a</sub>	65,9%	Cukup (sedang)
	PAD (X <sub>1</sub> )	0,166	P <sub>ZX1</sub> ≠ 0, maka menerima H <sub>a</sub>	2,76 %.	Sangat lemah
	Dana Perimbangan (X <sub>2</sub> )	0,797	P <sub>ZX1</sub> ≠ 0, maka menerima H <sub>a</sub>	63,52%	Cukup (sedang)
Belanja Pemeliharaan (Y)	X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , dan Z	0,450	R <sup>2</sup> ≠ 0, maka Menerima H <sub>a</sub>	45%	Cukup (sedang)
	PAD (X <sub>1</sub> )	-0,003	P <sub>YX1</sub> ≠ 0, maka menerima H <sub>0</sub>	0,000009	Sangat lemah
	Dana Perimbangan (X <sub>2</sub> )	0,593	P <sub>YX1</sub> ≠ 0, maka menerima H <sub>a</sub>	35,16%	lemah
	Belanja Modal (Z <sub>1</sub> )	0,288	P <sub>YZ</sub> ≠ 0, maka menerima H <sub>a</sub>	8,29%	Sangat lemah

Sumber: Data diolah (2018)

### E. Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,659 (65,9%).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal sebesar 0,450 (45%).
3. Secara parsial PAD berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,166 (2,76%).

*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah*

*Aulia Fikki*

4. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,797 (63,52%).
5. Secara parsial PAD berpengaruh negatif terhadap belanja pemeliharaan dengan nilai koefisien *Path* -0,003.
6. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan sebesar 0,593 (35,16%),
7. Secara parsial belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan sebesar 0,288 (8,29%).

### Daftar Pustaka

Abdullah, Syukriy (2006). *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. (<http://www.Syukriy.wordpress.com>, diakses 10 Oktober 2009).

----- & Abdul Halim (2004). Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. *SNA VI*.

----- & Jhon Andra Asmara (2006). Pengaruh Oportunistik Legeslatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik.”. *SNA IX*.

Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bland, Robert dan Samuel Nunn (1992). “ *The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budget*”. *Public Budgeting & Finance* (Summer): 32-47. (<http://www.Rapidshare.com>, diakses 30 Oktober 2009).

Halim, Abdul (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

----- (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005). *Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Moisio, Antti (2002). *Essays on Finish Municipal Finance and Intergovernmental Grants*. Helsinki.

Nafarin, M (2003). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Noerdiawan, Dedi (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Aceh (2008). Qanun No.1 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Keuangan Aceh*.

Pemerintah Indonesia (2002). *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

------(2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.

------(2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

------(2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

------(2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah*.

------(2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.

Sugiyono (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Uma, Sekaran (2002). *Research Methods for Business, Buku 1, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Welshch, Glenn A,dkk (2000). *Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Jakarta: Salemba Empat.

World Bank (2006). *Analisis Pengeluaran Publik Aceh: Pengeluaran untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan*.

------(2008). *Analisis Belanja Publik Aceh Edisi Terbaru Tahun 2008: Mengelola Sumber Daya untuk Mencapai Keluaran yang Lebih Baik di Daerah Otonomi Khusus*.